



JELANG TAHUN BARU IMLEK DI BEIJING

Personel keamanan berjaga-jaga saat para pelancong tiba di Stasiun Kereta Api Beijing menjelang perayaan Tahun Baru Imlek karena pemerintah mengimbau masyarakat untuk menghindari perjalanan karena wabah virus COVID-19, di Beijing, Tiongkok, Senin (8/2).

Presiden Haiti Klaim Hendak Dikudeta dan Dibunuh, 23 Orang Ditangkap

Situasi politik kacau, oposisi menyatakan jabatan Presiden Jovenel Moise harusnya berakhir hari Minggu kemarin.

PORT-AU-PRINCE (IM)

Presiden Haiti Jovenel Moise mengklaim dirinya hendak dikudeta dan dibunuh. Aparat penegak hukum setempat telah menangkap 23 orang, termasuk seorang hakim Mahkamah Agung dan seorang perwira polisi berpangkat tinggi yang dituduh terlibat dalam upaya kudeta.

“Tujuan orang-orang ini adalah untuk mencoba (mengambil) hidup saya,” kata Moise kepada wartawan pada hari Minggu, yang dilansir Russia Today, Senin (8/2). Dia

menambahkan bahwa plot itu digagalkan.

Presiden juga mengatakan bahwa plot tersebut sedang dikerjakan setidaknya sejak akhir November. Dia menambahkan hakim Mahkamah Agung dan seorang inspektur jenderal polisi termasuk di antara para tersangka yang ditangkap.

Negara Karibia tersebut pada saat ini berada dalam kekacauan karena perselisihan antara Moise dan kubu oposisi yang menuntutnya mundur. Reynold Georges, seorang

pengacara yang pernah bekerja untuk presiden tetapi kemudian bergabung dengan oposisi, mengidentifikasi hakim yang ditangkap sebagai Irvikel Dabresil—seorang pria yang juga dilaporkan menikmati dukungan dari lawan-lawan presiden.

Pihak oposisi mengancam penangkapan itu dan menyuarakan pembebasan segera semua orang yang ditahan. Kubu oposisi mendesak warga Haiti untuk bangkit melawan presiden. Mereka menyatakan bahwa masa jabatan presiden Moise seharusnya berakhir hari Minggu kemarin.

Sementara itu, Presiden Moise sendiri menegaskan dia memiliki hak untuk tetap menjabat hingga Februari 2022.

Perselisihan itu muncul dari semrawutnya pemilihan

presiden pada 2015. Saat itu, Moise semula dinyatakan sebagai pemenang, namun hasil pemungutan suara kemudian dibatalkan karena dugaan kecurangan. Meski begitu, Moise berhasil terpilih tahun berikutnya dan akhirnya dilantik pada Februari 2017. Karena kecacauan pemilu, negara itu diperintah oleh presiden sementara selama setahun.

Moise juga telah memutuskan melalui keputusan sejak Januari 2020 ketika masa jabatan parlemen terakhir berakhir tetapi tidak ada pemilihan umum yang diadakan. Sekarang, Haiti diharapkan mengadakan pemilihan parlemen pada bulan September—beberapa bulan setelah referendum konstitusi yang dijadwalkan pada bulan April yang diharapkan mem-

berikan presiden lebih banyak kekuasaan.

Selama beberapa tahun terakhir, negara itu juga menyaksikan protes publik besar-besaran atas korupsi dan kejahatan geng yang merajalela. Namun, Moise menikmati dukungan dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Baru-baru ini, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan bahwa “presiden terpilih yang baru harus menggantikan Presiden Moise ketika masa jabatannya berakhir pada 7 Februari 2022.”

Meskipun demikian, Price juga mendesak Haiti untuk mengatur pemilihan umum dengan benar pada bulan September untuk memungkinkan parlemen melanjutkan pekerjaannya. ● tom

Lawan Pemerksa, Para Wanita Afrika Selatan Kini Bawa Senjata Api

JOHANNESBURG (IM) - Bagi lusinan wanita yang berlatih di tempat latihan tembak dekat Johannesburg, Afrika Selatan, mempelajari cara menggunakan senjata api telah menjadi sarana perlindungan di negara di mana seorang wanita dibunuh setiap tiga jam.

Untuk pertama kali dalam hidupnya, Ntando Mthembu memegang pistol di tangannya. Tanpa ragu dia menembakkan 10 peluru ke arah target kardus.

November lalu, sepupu Mthembu, ditinggalkan sendirian di sebuah rumah selama beberapa jam, diperksa dan dibunuh secara beramai-ramai.

“Sebelum itu terjadi pada saya, saya ingin bersiap-siap,” kata Mthembu yang berusia 33 tahun.

Afrika Selatan adalah salah satu negara paling kejam di dunia, dan tingkat pembunuhannya terus meningkat.

Pada 2019-2020, negara itu mengalami 21.325 pembunuhan, naik 1,4 persen dari tahun sebelumnya. Data tersebut adalah laporan polisi tahunan terbaru.

Tingkat femisida di negara itu lima kali lebih tinggi dari rata-rata global.

Wanita adalah target di negara ini,” kata Matsie Noge, peserta lain dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemilik Senjata Afrika Selatan (GOSA).

Dia membawa serta putrinya yang berusia 24 tahun ke sesi tersebut, khusus untuk wanita. “Saya seharusnya melakukannya dengan cara sebelumnya, ketika dia berusia 15 tahun,” ujar Noge yang dilansir France24, Senin (8/2).

“Pelatihan ini berfokus pada wanita muda kulit hitam, yang secara statistik paling terpengaruh oleh kejahatan,” kata Themba Kubheka, yang mengorganisir pelatihan khusus wanita untuk GOSA.

“Setiap wanita di sini mengenal seorang wanita yang telah diperksa, dirampok. Masing-masing dari mereka memiliki cerita tentang kejahatan di negara ini.”

Bagi Kubheka, inti dari pelatihan ini adalah untuk membekali para wanita dengan keterampilan bela diri langsung dalam situasi berbahaya. “Alih-alih menunggu bantuan, mereka harus dapat merespons terlebih dahulu,” katanya, sambil mencatat bahwa polisi Afrika Selatan membutuhkan waktu rata-rata 15 menit un-

tuk tiba ketika diberi tahu tentang kasus penyerangan.

Sekitar 4,5 juta senjata digunakan secara legal di Afrika Selatan, dengan jumlah yang hampir sama kembali beredar di pasar gelap. Data itu bersumber dari Gun Free SA, sebuah kelompok yang mengadvokasikan pengendalian senjata.

Setelah menembakkan tiga peluru, Nthabangwe Phele yang berusia 32 tahun meletakkan revolvenya di atas mimbar. Tangannya gemetar dan dia berkeeringat; dia terlihat terganggu. “Memegang pistol mengingatkan saya pada posisi saya saat ini, saat saya berharap saya memilikinya,” katanya pelan.

Sembilan tahun yang lalu, dia diperksa di kamar tidurnya oleh seorang tetangga yang memanjat melalui jendela ke dalam rumah yang dia tinggali bersama orang tuanya di pinggiran Johannesburg.

Dia tidak mengajukan pengaduan pidana terhadap penyerangnya atau menerima dukungan apa pun. Orangnya menengurnya atas pemerkosaan yang dia alami, menuduhnya membuat malu keluarga.

Ketika Phele menceritakan kepada seorang teman, teman tersebut justru memerkosanya.

Prioritas Nasional

Polisi Afrika Selatan menerima 110 tuduhan pemerkosaan setiap hari. Seperti halnya tingkat pembunuhan, angka tersebut telah meningkat. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan 1,7 persen dalam kasus kekerasan seksual, atau 53.293 serangan yang tercatat secara total.

Membandingkan tingkat kekerasan seksual yang terlihat di Afrika Selatan dengan yang dialami di negara yang sedang berperang, Presiden Cyril Ramphosa mengumumkan pada akhir 2019 bahwa mengatasi momok pelecehan akan menjadi prioritas nasional.

“Ada bayang-bayang gelap dan tebal di seluruh negeri kami. Wanita dan anak-anak dikupung,” katanya pada saat itu, menggaribarkan Afrika Selatan sebagai salah satu “tempat paling tidak aman di dunia untuk wanita”.

Hari ini, Phele tinggal dengan seorang pacar, dan dia tahu tentang masa lalunya. Bersamanya, mereka memutuskan untuk memasang brankas di rumah—sehingga dia bisa menyimpan senjata. ● gul

Hukuman Mati Dibatalkan, Demonstran Anti-Rezim Saudi Batal Dipenggal

RIYADH (IM) - Seorang pria yang ditangkap dan dijatuhi hukuman mati karena ambil bagian dalam demo anti-rezim pemerintah saat remaja di Arab Saudi telah diringankan hukumannya menjadi penjara 10 tahun. Putusan itu membuatnya batal dieksekusi penggal atau pancung.

Kelompok hak asasi manusia (HAM) Reprieve melaporkan hukuman untuk pria bernama Ali al-Nimr diringankan menjadi 10 tahun penjara oleh Pengadilan Kriminal Khusus pada hari Minggu (7/2).

Ayahnya, Mohammed al-Nimr, yang menghadiri sidang di Riyadh, mengatakan bahwa putranya yang sekarang 26 tahun akan bebas dalam delapan atau sembilan bulan setelah menghabiskan lebih dari sembilan tahun masa mudanya dan sebagian masa kecilnya di penjara.

Ali al-Nimr adalah keponakan ulama syiah Arab Saudi; Nimr al-Nimr, yang dieksekusi mati beberapa tahun lalu. Ali al-Nimr, ditangkap pada 2012 pada

usia 17 tahun karena ikut serta dalam protes yang menyerukan reformasi sosial dan politik di provinsi Qatif yang bergolak di Arab Saudi. Dia kemudian dijatuhi hukuman mati.

Pengadilan kemudian memvonisnya atas berbagai tuduhan termasuk termasuk terlibat dalam jaringan teroris, menyerang polisi dengan bom molotov, menghasut dan memicu sektarianisme.

Pada tahun 2015, CNN melaporkan banding terakhirnya telah ditolak dan dia akan menghadapi eksekusi pancung, bersama dengan hukuman tambahan yang lebih langka berupa penyaliban, yang akan membuat tubuhnya dipajang di depan umum sebagai peringatan bagi orang lain.

Hukumannya diringankan setelah Arab Saudi mengumumkan April lalu bahwa sebagai bagian dari keputusan kerajaan itu akan menghapus hukuman mati bagi orang-orang yang melakukan kejahatan saat usianya masih di bawah umur.

Siapa pun yang menerima huku-

man mati setelah dihukum atas kejahatan yang mereka lakukan sebagai anak di bawah umur akan menerima hukuman penjara tidak lebih dari 10 tahun di fasilitas penahanan remaja. Demikian pernyataan dari Komisi Hak Asasi Manusia (HRC) Arab Saudi yang didukung kerajaan.

“Saya dan keluarga saya bahagia. Saya berharap semua yang ditangkap di negara saya dan di tempat lain (akan) dibebaskan,” kata ayah Ali kepada CNN setelah putusan pengadilan hari Minggu, yang dilansir Senin (8/2).

Namun, dia menjelaskan bahwa dia berharap putranya dibebaskan oleh hakim karena sebenarnya tidak bersalah.

“Keselamatannya bagus, tapi dia telah di penjara selama lebih dari sembilan tahun. Dia menghabiskan lebih dari tujuh tahun dengan ancaman eksekusi menggantung di kepalanya setiap hari, setiap jam dan setiap menit. Setelah putusan, dia bisa bernapas lega. Mulai hari ini, dia menanti kebebasan,” imbuh ayah Ali. ● ans

PM Libya Desak Dunia Internasional Bantu Wujudkan Stabilitas

LIBYA (IM) - Dalam pidato pertamanya sejak mengambil alih kekuasaan, Perdana Menteri (PM) baru Libya mengatakan pemerintahannya berkomitmen memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga dan mewujudkan stabilitas di kawasan. “Kami mengimbau semua negara, tanpa terkecuali, untuk menjadi mitra kami dalam mewujudkan stabilitas di kawasan dengan berkontribusi pada eksistensi Libya sebagai negara yang stabil secara politik, keamanan dan ekonomi,” ujar Abdul Hamid

Mohammed Dbeibah.

Pejabat Libya itu berterima kasih kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan semua anggota Forum Dialog Libya, yang memilihnya sebagai perdana menteri sementara. Dbeibah, seorang pengusaha kuat yang didukung oleh suku-suku barat, menekankan bahwa kegagalan dalam tahap sejarah Libya yang sensitif ini bukanlah pilihan. Ia menyerukan semua warga Libya untuk bersatu dan mendukung pemerintahannya.

Sebelumnya, perdana menteri itu mengumumkan keinginannya

membentuk kementerian rekonsiliasi nasional dan membagi negara dalam zona-zona keamanan.

Di bawah langkah-langkah yang diuraikan, Dbeibah harus membentuk Kabinet dan mempresentasikan programnya dalam waktu tiga minggu. Penjabat utusan khusus Sekjen PBB untuk Libya, Stephanie Williams, mengatakan pemerintah sementara harus sepenuhnya mendukung gencatan senjata, menyetujui pengalihan pemilu dan meluncurkan “proses rekonsiliasi nasional yang komprehensif.” ● tom



TEPI SUNGAI SEINE DAN MENARA EIFFEL

Pemandangan tepi sungai Seine yang banjir dan Menara Eiffel setelah berhari-hari cuaca hujan di Paris, Prancis, Minggu (7/2).

Banjir Bandang India, 150 Dikhawatirkan Tewas

CHAMOLI (IM) - Sekitar 150 orang dikhawatirkan tewas setelah gletser atau endapan es pecah di Himalaya, jatuh ke sebuah bendungan di India dan menyebabkan banjir bandang.

Insiden itu terjadi pada Minggu (7/2) pagi di distrik Chamoli di negara bagian Uttarakhand, India utara, dekat perbatasan dengan Tibet.

Kepala sekretaris negara bagian setempat, Om Prakash, mengatakan kepada Reuters sekitar 150 orang dikhawatirkan tewas. “Tetapi jumlah sebenarnya belum dikonfirmasi,” katanya.

Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan dia “terus memantau situasi yang tidak menguntungkan”.

Penduduk di daerah tersebut telah disiagakan karena kenaikan permukaan air.

Sekitar 600 personel tentara telah dikirim ke wilayah tersebut sejauh ini untuk membantu.

The Times of India telah melaporkan tiga jasad telah ditemukan, sementara pekerjaan sedang dilakukan untuk menyelamatkan 16 orang yang terperangkap di dalam tero-

wongan. Proyek pembangkit listrik tenaga air terdekat telah tersapu sepenuhnya. Menurut otoritas setempat, dikhawatirkan para pekerja di proyek tersebut juga ikut tersapu.

Seorang saksi mata mengatakan kepada Reuters bahwa dia melihat dinding tanah, batu, dan air mengalir di lembah sungai. “Ini datang sangat cepat, tidak ada waktu untuk mempersiapkan siapa pun,” katanya.

Uttar Pradesh, negara bagian tetangga yang paling padat penduduknya di India, mengeluarkan peringatan untuk wilayah tepi sungainya.

Kepala Menteri Uttarakhand Trivendra Singh Rawat mengatakan dia berada di tempat kejadian dengan timnya memantau situasi. “Tidak ada situasi banjir di mana pun, tetapi sungai itu mengalir satu meter di atas level normalnya,” ujarnya.

Dalam tindak lanjutnya dia mengatakan tidak ada alasan untuk panik dan mengimbau orang untuk tidak percaya rumor. ● gul

AS Akan Kembali Bergabung dalam Dewan HAM PBB

WASHINGTON (IM) - Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden akan bergabung kembali dengan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB), tiga tahun setelah eks Presiden Donald Trump menghanguskan dari lembaga tersebut.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken segera membuat pengumuman pada Senin (8/2) waktu Indonesia bahwa Amerika akan kembali ke Dewan yang berbasis di Jenewa, Swiss, itu sebagai pengamat, menurut pejabat Departemen Luar Negeri AS.

“Kami bermaksud untuk melakukannya, mengingat bahwa jalan paling efektif untuk mereformasi dan memperbaiki Dewan adalah terlibat dengannya dalam cara yang berprinsip,” kata pejabat tersebut.

“Kami memahami bahwa

Dewan berpotensi untuk menjadi forum yang penting bagi mereka yang tengah berjuang melawan tirani dan ketidakadilan di seluruh dunia. Dengan berada di dalamnya, kami berupaya mereformasi dan memastikan lembaga ini dapat memenuhi potensi itu,” kata dia menambahkan.

Rencana kembalinya AS tersebut pertama kali dilaporkan oleh Associated Press.

Sebelumnya, Trump, dengan agenda “America First” (Dahulukan Amerika) yang berkontribusi pada keputusannya menarik AS dari sejumlah organisasi dan perjanjian internasional, keluar dari Dewan HAM PBB pada 2018, separuh jalan dari periode keanggotaan tiga tahunan. Trump menganggap Dewan cenderung tidak berpihak pada Israel serta tidak mereformasi diri.

Majelis Umum PBB dengan 193 anggota dijadwalkan untuk memilih anggota-anggota baru Dewan tahun ini. Para anggota dipilih untuk duduk selama tiga tahun dan tidak dapat menjabat lebih dari dua periode berturut-turut.

Kandidat anggota dipilih melalui pemungutan suara dalam kelompok geografis untuk menjamin adanya representasi. Sesi berikutnya dewan yang berangkat 47 negara tersebut akan dimulai menjelang akhir Februari. ● ans



UNJUK RASA PERAWAT MENENTANG KUDETA MILITER MYANMAR Perawat menunjukkan penghormatan tiga jari saat mereka unjuk rasa dalam protes menentang kudeta militer dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, di Yangon, Myanmar, Senin (8/2).

Demonstrasi Anti-Kudeta Myanmar Masuki Hari Ketiga, Pekerja Lakukan Pemogokan Nasional

YANGON (IM) - Ribuan orang bergabung dalam protes anti-kudeta di seluruh Myanmar pada Senin (8/2), dengan para pekerja melakukan pemogokan nasional, menuntut pembebasan pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi dan kembalinya demokrasi.

Di ibu kota komersial, Yangon, lebih dari 1.000 orang berkumpul di sebuah taman pada Senin pagi, membantu memulai demonstrasi hari ketiga berturut-turut setelah kudeta pekan lalu.

“Ini hari kerja, tapi kami tidak akan bekerja bahkan jika gaji kami dipotong,” kata seorang pengunjuk rasa, Hnin Thazin (28), seorang pekerja pabrik garmen, kepada AFP.

Di kota terbesar kedua Myanmar, Mandalay, lebih dari seribu orang juga berkumpul hingga tengah pagi. Ratusan orang terlihat berkumpul di Ibu Kota Naypyidaw, mengendarai sepeda motor dan membunyikan klakson mobil, sementara aksi unjuk rasa besar juga dilaporkan di kota-kota lain.

Para pengunjung rasa di persimpangan pusat kota besar Yangon meneriakkan slogan, memberi hormat tiga jari dan membawa plakat bertuliskan “Tolak kudeta militer” dan “Keadilan untuk Myanmar”. Dimulai dengan beberapa ratus orang, kerumunan bertambah melebihi seribu, dan mobil yang lewat membunyikan klakson mereka sebagai solidaritas.

Beberapa kelompok yang lebih kecil berhenti dari protes

utama dan menuju ke Pagoda Sule, tempat berkumpulnya protes besar sebelumnya terhadap pemerintahan militer yang berkuasa sebelumnya.

Tindakan Senin menyusul protes pada Minggu (7/2) yang melibatkan puluhan ribu orang yang berdemo untuk menuntut pembebasan pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi dan tokoh-tokoh top lainnya dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi miliknya.

Protes yang berkembang adalah pengingat tajam dari perjuangan panjang dan berdarah untuk demokrasi di negara yang dikuasai militer secara langsung selama lebih dari lima dekade sebelum melonggarkan cengkramannya pada 2012. Pemerintahan Aung San Suu Kyi, yang memenangkan pemilihan umum pada tahun 2015, telah yang pertama dipimpin oleh warga sipil dalam beberapa dekade, meskipun kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi yang dirancang militer.

Demonstran semakin bertambah banyak dalam beberapa hari terakhir. Demonstrasi tetap berjalan tanpa kekerasan, mendukung seruan dari partai Aung San Suu Kyi dan sekutunya untuk pembungkaman sipil.

Anggota parlemen terpilih dari partai Aung San Suu Kyi bertemu dalam pertemuan online Jumat (5/2) lalu untuk menyatakan diri mereka sebagai satu-satunya perwakilan rakyat yang sah dan meminta pengakuan internasional sebagai pemerintah negara. ● gul